

CIRI-CIRI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI PERKOTAAN DAN PEDESAAN: KAITANNYA DENGAN KIE GIZI, PANGAN DAN KESEHATAN

Oleh: Djoko Susanto; Siti H. Soetedjo; Tjetjep S. Hidayat; Hermina;
Triasari Andanwerti dan Nurfi Afriansyah

ABSTRAK

Adanya lapisan masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan dan di pedesaan tidak terlepas dari fenomena kemiskinan. Berbagai telaahan dari sudut pandang yang berbeda telah dilakukan misalnya oleh Alfian dkk. (1980) Misra dan Bhooshan (1981), Andre Bayo Ala (1981), Sen (1982), Bambang Try Cahyono (1983), Parsudi Suparlan (1984), Penny (1984) dan lainnya. Temuan dari telaahan terdahulu itu umumnya menunjukkan bahwa masalah kemiskinan erat berkaitan dengan keterbatasan asset dan akses yang dimiliki oleh lapisan masyarakat ini. Tujuan penelitian ini: Menggali informasi tentang asset dan akses terhadap pelayanan gizi, pangan dan kesehatan guna meningkatkan program KIE bagi pihak yang terkait. Penelitian dilakukan di Kelurahan Kalibaru Jakarta Utara dan Kelurahan Rungkut Kotamadya Surabaya, keduanya di wilayah kumuh perkotaan, dan di Desa Tanjung Pakis Kabupaten Karawang di wilayah miskin pedesaan. Di masing-masing lokasi dipilih 50 keluarga responden secara acak, di samping itu dipilih pula 10 Kader Posyandu dan tiga orang Tokoh Masyarakat setempat. Pejabat Instansi Kesehatan, Pertanian, Kesejahteraan Rakyat, Sosial dan Pemerintah Daerah Tingkat I, Tingkat II dan Kecamatan sebagai responden. Hasil-hasil penting penelitian ini sebagai berikut: (1) Asset pendidikan: lebih dari 50 % kepala keluarga berpendidikan Sekolah Dasar dan tidak tamat Sekolah Dasar. Sementara lebih dari 90% isteri responden berpendidikan rendah (SD, tidak tamat SD dan buta aksara). (2) Sumber nafkah utama kepala keluarga memburuh dan berdagang kecil-kecilan. Lebih dari setengah isteri responden di Kalibaru dan Tanjung Pakis tidak bekerja, sedangkan sebagian besar isteri responden di Rungkut bekerja membantu suami sebagai pedagang kecil dan buruh serabutan. (3) Setengah dari keluarga di wilayah perkotaan (Kalibaru dan Rungkut) berpenghasilan antara Rp.100.000,- - Rp.150.000,- sebulan. Sedangkan 70% keluarga di Tanjung Pakis berpenghasilan antar Rp.50.000,- - Rp.100.000,-, dan 22 % berpenghasilan kurang dari Rp.50.000,- sebulan. (4) Sebanyak 60 - 70 % pengeluaran keluarga dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pangan, dan sekitar seperlima (20 %) untuk keperluan kerukunan sosial. (5) Seluruh responden makan dua kali sehari, dan beras menjadi makanan pokok mereka. Menu makanan mereka sangat sederhana. Konsumsi tempe dan/atau tahu ditemukan hampir setiap hari pada semua keluarga di Kalibaru dan Rungkut. Ikan laut dikonsumsi oleh semua keluarga di Kalibaru sesuai musimnya. Ikan asin dikonsumsi setiap hari oleh sebagian besar keluarga di Tanjung Pakis dan Rungkut. (6) Pelayanan Posyandu, Puskesmas dan bidan lebih banyak dimanfaatkan oleh sebagian besar keluarga di Kalibaru dan Rungkut, sementara sebagian besar keluarga di Tanjung Pakis lebih banyak memanfaatkan pengobatan tradisional. Penanganan masalah gizi, pangan dan kesehatan pada lapisan masyarakat berpenghasilan rendah hendaknya dilakukan secara proporsional sesuai lokasi dan kebutuhan nyata sasaran, dan dilaksanakan terencana, terpadu dan berkesinambungan dengan mengikutsertakan tokoh masyarakat dan LSM setempat.

Pendahuluan

Lapisan masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin ada di dalam sistem sosial masyarakat bukan tanpa sebab. Mereka dikatakan berpenghasilan rendah dan miskin karena taraf pemenuhan kebutuhan dasar yang relatif rendah sebagai akibat dari keterbatasan asset yang dimiliki, rendahnya akses terhadap berbagai pelayanan umum (1, 2, 3), serta tingkat alat tukar (exchange entitlement) yang rendah (4). Bahkan secara ekstrim Todaro selanjutnya menyatakan, bahwa kemiskinan yang ditemukan di wilayah Dunia Ketiga bukan disebabkan semata-mata oleh tingkat pendidikan yang masih rendah pada

kalangan sebagian besar masyarakat, tetapi lebih disebabkan oleh adanya tatanan dan struktur ekonomi dualistik yang menjadi kendala pemerataan pendapatan sehingga pendapatan/daya beli lapisan masyarakat berpenghasilan rendah sangat sulit ditingkatkan (1).

Hak-hak lapisan masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin untuk memperoleh kehidupan yang layak acapkali didapatkan tidak seperti yang biasa diperoleh mereka yang berpenghasilan menengah atau tinggi. Mereka tidak jarang mengalami pula **deprivasi**, yakni berupa pengurangan atau pemerkosaan hak dalam berbagai bidang yang menyangkut alat tukar yang dimiliki, baik hal itu mengenai benda/barang maupun jasa, termasuk tenaga kerja. Dalam penentuan jumlah uang sebagai imbalan jasa anggota lapisan masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin, maka posisi golongan ini relatif berada pada kondisi yang statis dan pasif karena pengambilan keputusan mengenai hal itu lebih banyak ditetapkan oleh mereka yang taraf kehidupannya lebih baik, padahal, selaku manusia seutuhnya, lapisan masyarakat ini pada hakekatnya memiliki hak hidup yang relatif sama dengan mereka yang taraf kehidupannya lebih baik. Hak-hak hidup dan berkehidupan hanya akan mereka peroleh jika posisi mereka dalam masyarakat mendapatkan pengakuan (**well recognised**) dan pelayanan sebagaimana mestinya, baik melalui jalur pelayanan pemerintah maupun kelembagaan masyarakat yang terkait dengan program penanganan masalah kemiskinan.

Kebutuhan paling mendasar pada setiap individu dalam masyarakat adalah: pangan, perumahan, pakaian, pendidikan dan kesehatan. Dalam kondisi penghasilan rendah dan miskin, umumnya anggota-anggota masyarakat bersangkutan nyaris menumpahkan seluruh kegiatan dan waktunya guna memenuhi kebutuhan dasar yang paling hakiki, yakni pangan. Kebutuhan ini dapat dipenuhi jika, antara lain, kondisi-kondisi berikut ini tersedia, yaitu :

1. Ketersediaan pangan, terutama pangan pokok, dalam sistem pasar mencukupi kebutuhan dan terjangkau daya beli seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berpenghasilan rendah.
2. Golongan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki peluang dan akses untuk melakukan transaksi atas alat tukar yang dimiliki, baik berupa benda/barang maupun jasa menurut patokan tarif yang adil dan manusiawi.
3. Keberadaan (eksistensi) golongan ini disadari oleh semua instansi pemerintah yang terkait dalam penanganan program penanganan kemiskinan dan kelembagaan masyarakat sebagai salah satu *masalah nasional*. Di samping itu ada upaya terencana dan terpadu guna meningkatkan derajat kemanusiaan, kondisi sosial ekonomi dan sumberdaya insani yang dilakukan lebih sungguh-sungguh, konsisten dan berkesinambungan. Dalam rangka upaya peningkatan kualitas pelayanan gizi, pangan dan kesehatan bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah diperlukan kajian di lapangan berkenaan dengan beberapa aspek yang terkait dengan asset yang dimiliki dan dapat digunakan sebagai alat tukar (**exchange entitlement**) di dalam memperoleh pangan, kesehatan dan keperluan hidup lainnya. Pertanyaan kunci yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah :
 1. Bagaimana ciri-ciri golongan masyarakat ini dari sudut asset yang dimiliki, yang dapat mereka gunakan untuk memperoleh pangan sehari-hari ?

2. Bagaimanakah ciri-ciri pelayanan gizi, pangan dan kesehatan serta pelayanan lain bagi golongan masyarakat ini ?
3. Bagaimanakah akses golongan masyarakat ini terhadap pelayanan tersebut ?

Kedua pertanyaan kunci tersebut merupakan fenomena mendasar yang perlu dikaji pemecahannya agar pengetahuan kita mengenai ciri-ciri kemiskinan di wilayah perkotaan dan pedesaan dapat lebih berkembang. Dengan berkembangnya pengetahuan itu maka perencanaan strategi guna mengatasi masalah kemiskinan, khususnya berkenaan dengan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) gizi, pangan dan kesehatan dapat lebih mantap dilakukan.

Tujuan penelitian

A. Tujuan umum:

Menggal informasi di lapangan mengenai ciri-ciri keluarga berpenghasilan rendah dari sudut asset dan alat tukar untuk memperoleh pangan, serta akses terhadap pelayanan gizi, pangan dan kesehatan.

B. Tujuan khusus:

- a. Mendapatkan informasi mengenai ciri-ciri keluarga berpenghasilan rendah dari sudut pola konsumsi pangan, kondisi sosial ekonomi, akses pendidikan, pelayanan gizi, pangan dan kesehatan;
- b. Mendapatkan informasi mengenai wawasan pejabat pemerintah yang terkait, tokoh masyarakat, pengurus organisasi sosial dan kader Posyandu berkenaan dengan aspek pemerataan gizi, pangan dan kesehatan;
- c. Merumuskan strategi KIE gizi, pangan dan kesehatan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Bahan dan Cara

a. Lokasi penelitian:

Dua kelurahan telah dipilih secara sengaja di wilayah perkotaan di Jakarta dan Surabaya, dan satu wilayah kecamatan di Kabupaten Karawang dipilih sebagai gambaran wilayah dimana penduduk tergolong berpenghasilan rendah dan miskin.

Rincian lokasi penelitian adalah sebagai berikut:

Kotamadya/ Kabupaten	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	RW/RK
Jakarta Utara	Cilincing	Kalibaru	01. 06
Kodya Surabaya	Rungkut	Rungkut	05. 06
Karawang	Batu Jaya	Tanjung Pakis	01. 02

b. Responden:

1. Responden di tingkat propinsi, kabupaten dan kecamatan adalah pejabat instansi: kesehatan, pertanian, kesejahteraan rakyat/sosial, dan pemerintah daerah.
2. Di tingkat kecamatan ditentukan pula responden tokoh masyarakat setempat.
3. Responden di masing-masing kelurahan dan desa adalah sejumlah 50 kepala keluarga yang tergolong berpenghasilan rendah, dan 10 orang kader Posyandu setempat.

c. Cara pengumpulan data:

Semua data/informasi diperoleh dengan cara wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan kuesioner dan pedoman pengamatan.

Hasil dan Bahasan

Ciri-ciri keadaan sosial-ekonomi keluarga-keluarga dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Tingkat pendidikan kepala keluarga dan isteri

Seperti hasil temuan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Parsudi Suparlan (5), Bambang Tri Tjahyono (6) dan Penny (7), tingkat pendidikan tertinggi yang dapat dicapai oleh kepala keluarga dan isteri umumnya tamat Sekolah Dasar atau lebih rendah (lihat Tabel 1 dan Tabel 2.).

Tabel 1. Jumlah kepala keluarga menurut pendidikan tertinggi

Pendidikan/ Ijazah	Kalibaru		Rungkut		Td. Pakis	
	n	%	n	%	n	%
1. TS/BA*)	17	34	14	28	34	68
2. SD	29	58	21	42	16	32
3. SLTP	2	4	8	16	-	-
4. SLTA	2	4	7	14	-	-
Jumlah	50	100	50	100	50	100

*) TS/BA = Tidak sekolah, Buta Aksara

Tabel 2. Jumlah isteri responden menurut pendidikan tertinggi

Pendidikan/ Ijazah	Kalibaru		Rungkut		Td. Pakis	
	n	%	n	%	n	%
1. TS/BA	28	56	13	26	38	76
2. SD	21	42	28	56	12	24
3. SLTPene-	1	2	7	14	-	-
4. SLTA	-	-	2	4	-	-
Jumlah	50	100	50	100	50	100

Dari kedua Tabel tersebut tampak bahwa pendidikan tertinggi yang dapat dicapai oleh lebih dari setengah kepala keluarga di tiga lokasi adalah tamat Sekolah Dasar. Lebih dari setengah dari jumlah isteri responden di Kalibaru dan Tanjung Pakis tidak menamatkan Sekolah Dasar, bahkan ada pula yang masih buta aksara.

Sementara itu, 113 anak usia sekolah di Kalibaru 11% berstatus tidak sekolah; 9% dan 27% anak-anak usia sekolah di Rungkut dan Tanjung Pakis tidak sekolah (lihat **Tabel 3.**). Dari responden yang tidak dapat menyekolahkan anaknya diperoleh keterangan mengenai latar belakang bahwa keadaan itu disebabkan oleh keterbatasan biaya dan keterlibatan anak di dalam upaya mencari nafkah membantu orangtua.

Tabel 3. Jumlah anak usia sekolah menurut akses pendidikan

Akses pendidikan	Kalibaru		Rungkut		Td. Pakis	
	n	%	n	%	n	%
1. Dapat sekolah	101	89	105	91	40	73
2. Tidak sekolah	12	11	11	9	15	27
Jumlah	113	100	116	100	55	100

2. Sumber mata pencaharian utama

Sesuai dengan ciri lingkungan ekologi di mana para responden tinggal, maka mata pencaharian utama kepala keluarga dan isteri bersumber dari pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan kondisi itu dan yang sifatnya berburuh. Sebagai contoh, responden kepala keluarga di Kalibaru dan Tanjung Pakis lebih banyak berburuh di sektor nelayan karena kedua wilayah itu berlokasi di daerah pantai, sementara kepala keluarga di Rungkut lebih banyak menjadi pedagang kecil dan buruh pabrik, karena wilayah itu berlokasi di lingkungan pabrik. Sumber mata pencaharian utama kepala keluarga disajikan pada **Tabel 4.** Sementara status pekerjaan isteriresponden di Kalibaru dan Tanjung Pakis adalah sebagai ibu rumah tangga.

3. Perkiraan pendapatan keluarga sebulan

Data mengenai pendapatan keluarga sebulan rata-rata pada golongan berpenghasilan rendah tidak mudah diperoleh dengan tepat karena sifat pemasukan uang yang lebih banyak tidak menentu. Kondisi pendapatan tidak menentu ini lebih jelas ditemukan di Kalibaru dan Tanjung Pakis di mana terdapat persen keluarga relatif besar yang mendapatkan upahnya dari perikanan laut yang sangat tergantung pada musim.

Tabel 4. Jumlah kepala keluarga menurut mata pencaharian utama

Jenis pekerjaan utama	Kalibaru		Rungkut		Td. Pakis	
	n	%	n	%	n	%
1. Buruh nelayan	24	48	-	-	21	42
2. Pedagang kecil	17	34	20	40	5	10
3. Buruh tambak	-	-	-	-	12	24
4. Buruh pabrik	-	-	10	20	-	-
5. Buruh serabutan	9	18	16	32	12	24
6. Pegawai negeri golongan I	-	-	4	8	-	-
Jumlah	50	100	50	100	50	100

Tabel 5. Jumlah isteri responden menurut status pekerjaan utama

Jenis pekerjaan utama	Kalibaru		Rungkut		Td. Pakis	
	n	%	n	%	n	%
1. Buruh nelayan	-	-	-	-	3	6
2. Pedagang kecil	17	34	35	70	3	6
3. Buruh serabutan	4	8	3	6	5	10
4. Buruh tambak	-	-	-	-	2	4
5. Ibu rumah tangga	29	58	12	24	37	74
Jumlah	50	100	50	100	50	100

Golongan keluarga berpenghasilan rendah di Kalibaru dan Rungkut (perkotaan) secara absolut lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tinggal di Tanjung Pakis (pedesaan). Tetapi perbedaan itu menjadi relatif sifatnya karena biaya hidup di wilayah perkotaan ternyata juga lebih tinggi dibandingkan dengan biaya hidup di wilayah pedesaan. Sekitar 66% keluarga di Kalibaru dan 50% keluarga di Rungkut berpenghasilan antara Rp.100,000.- Rp. 150,000.- per bulan. tetapi di samping itu masih ditemukan masing-masing sebanyak 10% dan 26% dari keluarga di Kalibaru dan Rungkut yang berpenghasilan kurang dari Rp.50,000.- per bulan. Sementara itu sebagian besar (70%) dari keluarga yang tinggal di wilayah Tanjung Pakis berpenghasilan antara Rp.50,000.- sampai Rp.100,000.- per bulan. Sekitar seperlima (22%) dari keluarga responden masih ada yang berpenghasilan kurang dari Rp. 50,000.- per bulan.

Tabel 6. Jumlah keluarga menurut estimasi pendapatan sebulan (dalam ribuan Rupiah)

Kelas pendapatan	Kalibaru		Rungkut		Td. Pakis	
	n	%	n	%	n	%
1. Kurang 50	5	10	13	26	11	22
2. 50 - 100	3	6	12	24	35	70
3. 101 - 150	33	66	25	50	4	8
4. 151 - 200	9	18	-	-	-	-
Jumlah	50	100	50	100	50	100

4. Pola pengeluaran keluarga

Semua keluarga sebulan masih didominasi oleh keperluan pembelian makanan sehari-hari. Ketergantungan keluarga terhadap makanan di luar rumah sangat besar, karena pada umumnya sebagian besar keluarga responden tidak memiliki lahan pertanian yang dapat menunjang keperluan ini. Pos pengeluaran yang relatif besar adalah guna memenuhi kebutuhan kerukunan sosial antar keluarga yang senasib, seperti membantu yang menderita kesusahan, dan sejenisnya (lihat Tabel 7).

5. Pola konsumsi makanan keluarga

Seluruh keluarga yang diteliti di ketiga lokasi biasa makan dua kali sehari..

Makanan keluarga sehari-hari yang selalu ditemukan pada kalangan keluarga-keluarga di ketiga lokasi penelitian adalah nasi sebagai makanan pokok sehari-hari. Demikian pula keluarga-keluarga responden di Rungkut yang sebagian besar dari mereka berasal dari Madura menggunakan beras sebagai makanan pokok sehari-hari.

Tabel 7. Prosen pengeluaran keluarga sebulan menurut pos-pos kebutuhan hidup

Pos pengeluaran	Kalibaru	Rungkut	Td. Pakis
1. Makanan	57.3	60.4	69.4
2. Pendidikan anak	4.7	8.1	1.4
3. Pemeliharaan kesehatan	3.4	2.3	2.6
4. Transport	7.1	7.5	0.2
5. Pakaian	3.2	4.1	3.7
6. Lain-lain: kerukunan sosial, air, kontrak rumah	24.3	17.6	22.7
Jumlah	100.0	100.0	100.0

Lauk-pauk yang hampir selalu ada menemani makanan pokok keluarga-keluarga di Kalibaru dan Rungkut adalah **tempe** dan/atau **tahu**. Di samping itu, **ikan laut** hampir selalu hadir di dalam menu makanan keluarga di Kalibaru, terutama pada musim banyak ikan, sementara keluarga-keluarga di Tanjung Pakis dan Rungkut umumnya mengkonsumsi **ikan asin** sebagai teman nasi sehari-hari.

Tabel 8. Jumlah keluarga menurut bahan makanan yang biasa dikonsumsi keluarga-keluarga di ketiga lokasi

Bahan makanan	Kalibaru		Rungkut		Td. Pakis	
	n	%	n	%	n	%
1. B e r a s	50	100	50	100	50	100
2. a. Hewani:						
- Ikan asin	10	20	42	84	46	92
- ikan laut	50	100	-	-	26	52
- Telur	33	66	22	44	1	2
b. Nabati:						
- Tempe	50	100	50	100	26	52
- T a h u	50	100	50	100	24	48
3. - Sayuran daun	50	100	41	82	30	60
- Sayuran kacang	2	4	23	46	28	56
- Sayuran buah	10	20	11	22	25	50
- Sayuran lain	-	-	25	50	16	32
- Pisang	23	46	26	52	3	6
- Pepaya	25	50	23	46	4	8
- Jeruk	27	54	13	26	8	16
- Semangka	3	6	5	10	10	20
- Buah lain	22	44	10	20	7	14

Sayuran daun hampir selalu menjadi bagian dalam menu makanan keluarga di Kalibaru, sedangkan sayuran lain tidak selalu hadir di dalam menu makanan keluarga. Hal ini sangat tergantung dari perolehan uang. Gambaran mengenai pola kebiasaan pangan keluarga disajikan dalam Tabel 8.

B. Pemerataan Pelayanan Gizi, Pangan dan Kesehatan Menurut Pejabat, Tokoh Masyarakat dan Kader Posyandu:

a. Informasi dari para pejabat:

Informasi yang diperoleh dari para pejabat di berbagai tingkat mengenai wawasan dan pengetahuan mereka mengenai pemerataan pelayanan gizi, pangan dan kesehatan bagi lapisan masyarakat berpenghasilan rendah umumnya mengacu kepada program-program sektoral yang telah ada.

Program-program sektoral yang dikemukakan adalah:

1. Program Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK), Puskesmas, pelayanan gizi dan kesehatan melalui Posyandu.
2. Program intensifikasi pekarangan, penganekaragaman pangan, program penyuluhan pangan dan gizi;
3. Kegiatan penyebaran brosur-brosur mengenai pangan dan gizi

Responden pejabat di berbagai tingkat umumnya menyatakan bahwa alternatif cara pemecahan masalah gizi, pangan dan kesehatan lapisan masyarakat berpenghasilan rendah memerlukan upaya-upaya atau kegiatan yang dilakukan secara terpadu antar lintas sektor yang terkait, terutama berkenaan dengan penyuluhan dan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) gizi, pangan dan kesehatan. Di samping itu para pejabat mengakui pula bahwa terdapat beberapa kendala yang bersifat mempersulit pencapaian tujuan dari upaya-upaya tersebut. Kendala-kendala yang umumnya disebutkan oleh para pejabat adalah:

1. Kurangnya dana untuk kegiatan operasional;
2. Tingkat pendidikan lapisan masyarakat ini umumnya masih rendah;
3. Pengetahuan gizi praktis masih kurang mendapat penekanan di dalam kegiatan penyuluhan gizi;
4. Peranserta lapisan masyarakat ini masih kurang di dalam program gizi dan kesehatan.

b. Informasi dari tokoh masyarakat:

Tokoh masyarakat di ketiga lokasi penelitian mengakui bahwa upaya pemerintah untuk membantu lapisan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperbaiki hidupnya telah ada, seperti melalui Posyandu. Tetapi peran serta masyarakat ini untuk mendayagunakan sarana pelayanan yang disediakan masih rendah karena waktu mereka banyak tersita oleh kegiatan mencari uang untuk keperluan hidup sehari-hari terutama guna memenuhi kebutuhan akan pangan. Upaya yang dilakukan oleh lapisan masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah Kalibaru dan Rungkut (perkotaan) untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, menurut tokoh masyarakat, adalah melalui pelayanan Posyandu, Puskesmas dan Bidan, sedangkan sebagian besar keluarga di wilayah Tanjung Pakis (pedesaan) mendaftari pelayanan kesehatan tradisional.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meringankan lapisan masyarakat ini, menurut tokoh masyarakat, adalah dengan pemberian modal untuk berdagang. Harapan ini dikemukakan oleh tokoh masyarakat di wilayah Kalibaru dan Rungkut (perkotaan), sementara tokoh masyarakat di wilayah Tanjung Pakis (pedesaan) berpendapat bahwa di samping bantuan modal, perlu pula dilakukan pendidikan ketrampilan melalui organisasi kemasyarakatan sesuai dengan minat masyarakat dan ketertiban wadah penampungan hasil-hasil usaha ketrampilan tersebut.

c. Informasi dari kader Posyandu:

Pengetahuan para kader Posyandu dalam aspek pemerataan pelayanan gizi dan kesehatan hanya terbatas pada kegiatan penimbangan anak balita di Posyandu dan pembuatan pelaporan melalui Kartu Menuju Sehat (KMS). Menurut para kader, peranserta lapisan masyarakat berpenghasilan rendah justru kurang, karena mereka lebih banyak menghabiskan waktu untuk mencari nafkah sehari-hari.

Simpulan

Untuk membantu lapisan masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perkotaan dan pedesaan diperlukan upaya-upaya secara terencana dan terkoordinasi serta terpadu dengan baik. Di samping itu, perlu dilakukan pembedaan di dalam upaya yang dilakukan antara sasaran di wilayah perkotaan dan di pedesaan.

Mengingat keluarga-keluarga berpenghasilan rendah di perkotaan lebih banyak menggunakan pelayanan kesehatan *modern*, seperti Puskesmas dan Bidan pada saat persalinan, maka diperlukan peningkatan pelayanan, di samping sudut mutu pelayanan dan pengobatan, juga dalam hal keringanan biaya (misalnya melalui sistem subsidi). Sementara itu, pelayanan kesehatan secara tradisional yang banyak diminati oleh keluarga-keluarga berpenghasilan rendah di pedesaan memerlukan upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan dukun dan peraji di dalam melayani mereka, agar **pengobatan tradisional** yang mungkin dapat berdampak negatif terhadap kesehatan lapisan masyarakat ini dapat dihindari.

Peningkatan pelayanan pendidikan dan berbagai upaya untuk memperkuat daya beli lapisan masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan dan di pedesaan menjadi isu sentral didalam fenomena kemiskinan. Oleh karena itu, upaya-upaya yang telah ada, seperti penggalangan ekonomi melalui koperasi dan penggalakkan tanaman pekarangan agaknya dapat dijadikan wahana strategi menanggulangi masalah kemiskinan pada lapisan masyarakat ini.

Saran

Dari kajian mengenai fenomena lapisan masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan dan pedesaan, maka pengembangan upaya KIE gizi, pangan dan kesehatan perlu dilakukan pada sektor-sektor pemerintah terkait dan lembaga swadaya masyarakat yang mengandung inti materi sebagai berikut:

1. Peningkatan pengakuan (*recognition*) atas hak-hak lapisan masyarakat berpenghasilan rendah, terutama hak atas pelayanan gizi, pangan dan kesehatan, tanpa membedakannya dengan mereka yang berkehidupan lebih baik;
2. Aspek penanganan masalah kemiskinan hendaknya dimasukkan sebagai bagian dari kegiatan UPGK;
3. Keterpaduan lintas sektor dan lintas program terkait hendaknya ditujukan, antara lain, untuk mengembangkan sistem **bapak angkat** bagi lapisan masyarakat berpenghasilan rendah;

4. Pengembangan dan penggalakan program untuk memobilisasi tenaga-tenaga **pengan-tar pembaruan** (*agent of change*) bidang gizi, pangan dan kesehatan yang berasal dari lingkungan sektor-sektor terkait dan LSM sedemikian rupa sehingga mereka dapat berperan sebagai **katalisator** dan sekaligus sebagai **motivator** perbaikan gizi, pangan dan kesehatan lapisan masyarakat berpenghasilan rendah.

Ucapan terima kasih

Tim peneliti mengucapkan terima kasih kepada Pejabat pejabat pemerintah tingkat propinsi, kabupaten/kodya dan kecamatan terkait, Tokoh-tokoh masyarakat tingkat keca-matan, para Kader PKK/Posyandu dan Pengurus Organisasi Sosial Kemasyarakatan se-tempat yang telah membantu kelancaran penelitian. Terutama kepada Dr Sonny L. Tobing (Kepala Suku Dinas kesehatan Wilayah Kota Jakarta Utara), Dr Ny. Hanifah Hazairin (Kepala Puskesmas Kec. Cilincing, Jakarta Utara), Dr Asep (Kepala Puskesmas Kec. Batu Jaya, Karawang), Dr Soedaryo (Kepala Dinas Kesehatan Kodya Surabaya), Dr. Sri Wahyuni (Kepala Puskesmas Kec. Rungkut, Surabaya), dan sdr. I.G.K. Sudibia BSc (Kepa-la Seksi Gizi Dinas Kesehatan Kodya Surabaya). Juga kepada anggota Kelompok Program Penelitian Bidang KIE Gizi Puslitbang Gizi Bojor, khususnya Sdr. Taufan Hermawan, Sdr. Hartono dan Sdr. Eman Sulaeman, kami ucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasama yang baik.

Rujukan

1. Todaro MP. Growth, poverty and income distribution. In: Todaro, MP, ed. Economic development in the third world. London and New York; Longman, 1978.
2. Alfian, Mely G Tan, dan Soemardjan S. Kemiskinan struktural suatu bunga rampai. Jakarta: YIIS, 1980.
3. Misra MP, and Bhooshan BS. Why do the rural areas stay poor. In: Misra RP, ed. Rural Development National Policies and Experiences. Nagoya, Japan: Maruzen Asia, 1980.
4. Sen A. Poverty and famine An essay on entitlement and deprivation. Oxford: Clarendon Press, 1982.
5. Suparlan P (Penyunting). Kemiskinan di perkotaan. Bacaan untuk antropologi perko-taan. Jakarta: Sinar Harapan, 1984.
- 6.. Cahyono B T . Masalah petani gurem. Yogyakarta: Liberty, 1983.
7. Penny DH. Kelaparan: peranan sistem pasar. PhD thesis, Canberra, 1984.